

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Setiap negara memiliki tujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Kesejahteraan masyarakat ini ditentukan oleh tingkat kualitas ekonomi dan kehidupan sosial masyarakatnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat ini akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi di suatu negara. Pembangunan ekonomi adalah suatu usaha yang dilakukan dengan disertai perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, yang nantinya pertumbuhan ekonomi tersebut dapat memperlancar proses pembangunan ekonomi.

Pembangunan atau pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari kenaikan pendapatan per kapita masyarakat. Namun, dalam suatu pembangunan ekonomi hal tersebut belum tentu menjadikan apa yang dicapai dalam pendapatan per kapita sebagai indikator tunggal dan memusatkan fokus pada kualitas dari proses pembangunan. Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran nyata dari dampak suatu kebijakan pembangunan ekonomi (Nurlina & Chaira, 2017).

Simon Kuznets (1871), dalam teorinya menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan itu tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi,

penyesuaian kelembagaan dan ideologi yang diperlukan (Jhingan, M. L. 2016). Idealnya, pembangunan ekonomi akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun, pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang pesat akan menimbulkan ketimpangan pendapatan (Dwi & Mukhlis, 2021).

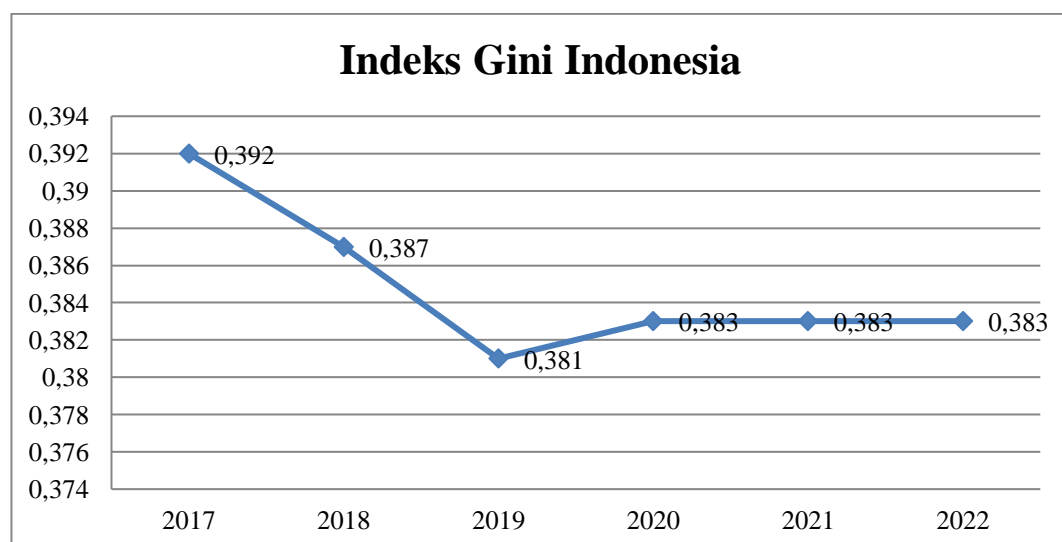
Indonesia merupakan negara sedang berkembang yang terdiri dari 38 provinsi, pada tahun 2022 Indonesia memiliki tambahan 4 provinsi baru. Provinsi baru tersebut merupakan pemekaran dari Provinsi Papua, sesuai RUU (Rancangan Undang-Undang) yang disahkan oleh DPR. Indonesia merupakan negara dengan perkembangan ekonomi yang cukup besar (Kemenkeu, 2021). Hal ini di topang oleh pemaksimalan kekayaan sumber daya yang dimiliki setiap daerah. Kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah berbeda-beda. Perbedaan ini dapat menyebabkan perbedaan dalam pembangunan dan pendapatan (Sutrisno, 2012).

Oleh karena itu, ketimpangan pendapatan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari selama masih ada perbedaan kemampuan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang menjadi perhatian disini adalah bagaimana cara untuk mengurangi ketimpangan pendapatan yang terlalu besar ini melalui pengelolaan faktor-faktor dan sumber daerah secara optimal. Dengan demikian, maka akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang baik disertai pemerataan pendapatan yang baik juga.

Menurut BPS (2022), alat ukur yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesenjangan pendapatan suatu daerah adalah dengan melihat indeks gini (*gini ratio*). Nilai indeks gini yaitu antara angka 0 sampai dengan angka 1. Suatu

daerah ketika nilai indeks gini mendekati 0 berarti bahwa daerah tersebut semakin merata. Sebaliknya, ketika nilai indeks gini suatu daerah mendekati 1 berarti bahwa daerah tersebut semakin timpang. Suatu daerah yang memiliki nilai indeks gini lebih dari 0,4 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di daerah tersebut termasuk tinggi.

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia tentunya juga melanda Indonesia. Dengan adanya pandemi ini menyebabkan kondisi perekonomian di Indonesia terganggu. Hal ini dikarenakan kondisi yang memaksa dilakukan kebijakan *lockdown* atau PSBB yang menurunkan mobilitas masyarakat. Roda perekonomian berhenti sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi sampai negatif. Permasalahan ekonomi lain yang timbul akibat dari adanya pandemi Covid-19 ini adalah permasalahan ketimpangan pendapatan (Junaedi & Salistia, 2020). Data mengenai ketimpangan pendapatan Indonesia dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

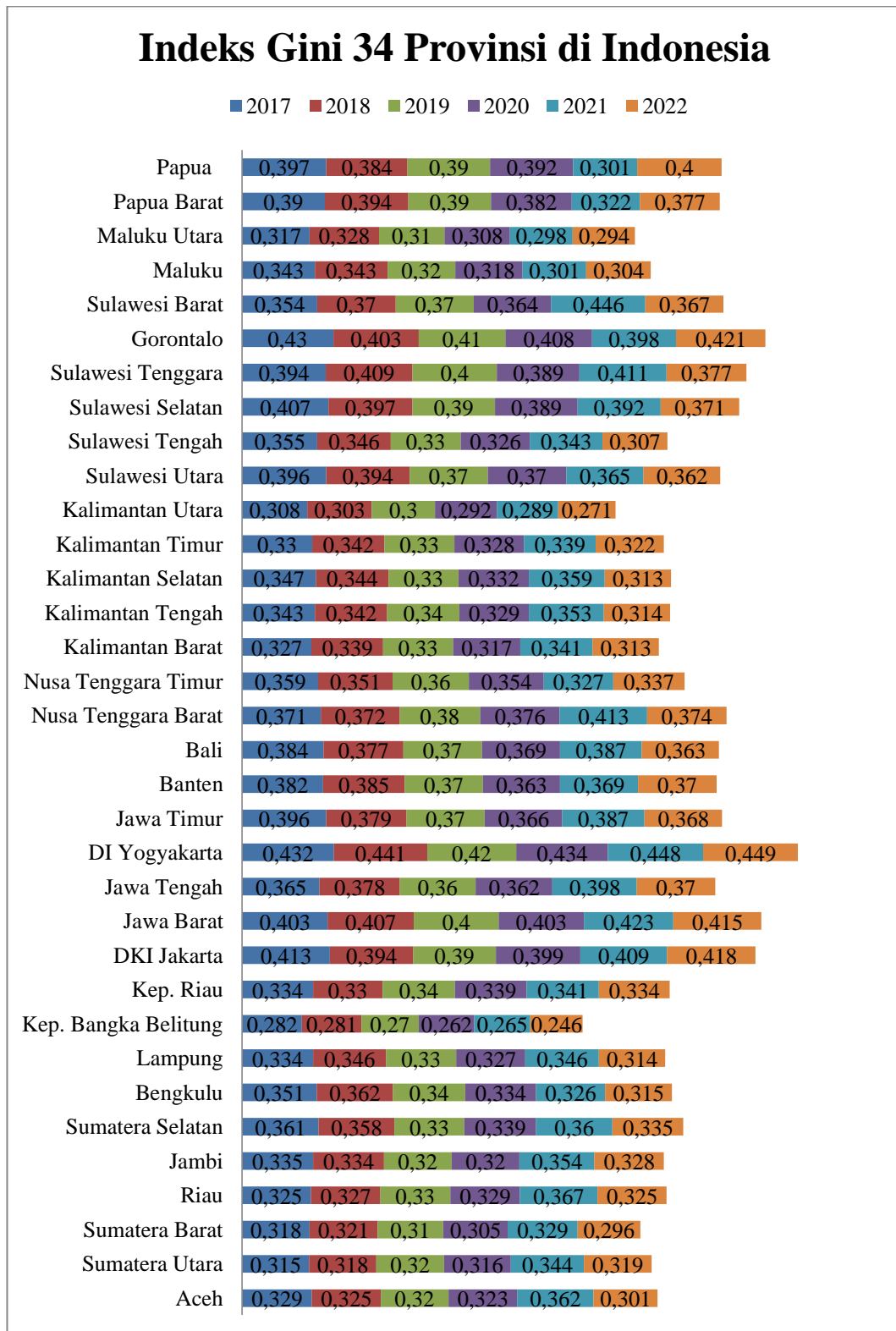


**Gambar 1. 1 Indeks Gini Indonesia Tahun 2017-2022**

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah penulis (2023).*

Gambar 1.1 menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia di tahun 2017-2022 mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan oleh dua kondisi ekonomi yaitu masa sebelum pandemi Covid-19 dan masa pandemi Covid-19. Berdasarkan data di atas, pada tahun 2017-2019 tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia mengalami perkembangan yang positif. Hal ini bisa dilihat dari nilai ketimpangan pendapatan secara agregat dimana nilainya semakin menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2017, indeks gini Indonesia sebesar 0,393, kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2019 mencapai angka 0,381. Namun, pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2020-2022 tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia kembali meningkat hingga mencapai angka 0,383. Kondisi ini tidak lepas dari adanya pengaruh kebijakan PSBB yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Masyarakat dengan pendapatan menengah kebawah sangat rentan terhadap kebijakan ini. Masyarakat kelas bawah banyak yang bekerja pada sektor informal yang membutuhkan kerja langsung ke lapangan. Dengan adanya kebijakan ini akan berdampak pada pekerjaan mereka. Banyak masyarakat yang tidak bisa melakukan aktivitas konsumsi karena pendapatan mereka yang turun. Di satu sisi, masyarakat dengan pendapatan menengah ke atas tidak begitu berdampak dengan munculnya pandemi ini. Hal ini dikarenakan mereka memiliki tabungan yang lebih serta pendapatan yang lebih untuk bertahan selama masa pandemi, sehingga tidak akan mempengaruhi konsumsi dari masyarakat tersebut (Dwi & Mukhlis, 2021). Berikut disajikan data ketimpangan pendapatan di 34 provinsi Indonesia yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



**Gambar 1. 2 Indeks Gini 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2022**

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah penulis (2023).*

Gambar 1.2 menunjukkan besaran nilai ketimpangan pendapatan 34 Provinsi di Indonesia pada tahun 2017-2022. Berdasarkan data di atas, provinsi dengan tingkat disparitas pendapatan tergolong tinggi berada di daerah Provinsi DI Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan daerah tersebut memiliki nilai indeks gini  $> 0,4$ . Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi yang memiliki rata-rata indeks gini terendah pada tahun 2017-2022 sebesar 0,246 dan Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0,449 sebagai provinsi dengan ketimpangan pendapatan tertinggi. Dengan meningkatnya tingkat ketimpangan pendapatan tiap tahun yang masih fluktuatif di berbagai daerah menunjukkan jika kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia, khususnya pada level provinsi masih belum maksimal dalam menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan di daerah mereka.

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah adalah angka PDRB per kapita. PDRB per kapita sering digunakan sebagai indikator pembangunan, semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut. Hal ini berarti juga bahwa semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain, jika pendapatan tinggi dan merata antar daerah maka ketimpangan pendapatan berkurang (Hartini, 2017).

Pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila suatu wilayah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata atau yang lebih dikenal dengan indeks pembangunan manusia

(IPM). Rendah atau tingginya IPM akan berdampak pada tingkat produktivitas penduduk, semakin rendah IPM maka tingkat produktivitas penduduk juga akan rendah kemudian produktivitas yang rendah akan berpengaruh pada rendahnya pendapatan, begitu pula sebaliknya semakin tinggi IPM akan semakin tinggi produktivitas penduduk yang kemudian mendorong tingkat pendapatan menjadi semakin tinggi.

Di beberapa wilayah maju, permintaan yang meningkat akan menarik investasi yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan memicu putaran kedua investasi dan seterusnya. Sedangkan, di wilayah terbelakang investasi dapat menciptakan kelangkaan modal. Investasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Investasi di Indonesia terdapat dua jenis, yaitu penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal luar negeri (PMA). Dengan investasi akan mendatangkan devisa, uang, modal, dan lapangan pekerjaan. Namun jika investasi sangat banyak dalam proyek-proyek padat modal (*capital intensive*) saja, menjadikan persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.

Hal yang baru dalam penelitian ini adalah terdapat variabel Covid-19 sebagai variabel *dummy* yang digunakan untuk membedakan periode pengamatan sebelum dan saat terjadinya krisis ekonomi di tahun 2017-2022 yang mana pada penelitian terdahulu belum ada yang secara khusus meneliti mengenai perbedaan pada masa sebelum dan pada saat pandemi Covid-19.

Berdasarkan fenomena yang sudah dijelaskan di atas, dan terdapat hal yang baru yang belum diteliti, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2022”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah yang dapat diambil sebagai dasar kajian pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keadaan PDRB per kapita, indeks pembangunan manusia, investasi dan Covid-19 terhadap ketimpangan pendapatan 34 Provinsi di Indonesia tahun 2017-2022?
2. Bagaimana pengaruh PDRB per kapita, indeks pembangunan manusia, investasi dan Covid-19 terhadap ketimpangan pendapatan 34 Provinsi di Indonesia tahun 2017-2022 secara parsial?
3. Bagaimana pengaruh PDRB per kapita, indeks pembangunan manusia, investasi dan Covid-19 terhadap ketimpangan pendapatan 34 Provinsi di Indonesia tahun 2017-2022 secara simultan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keadaan PDRB per kapita, indeks pembangunan manusia, investasi dan Covid-19 terhadap ketimpangan pendapatan 34 Provinsi di Indonesia tahun 2017-2022.



2. Untuk mengetahui pengaruh PDRB per kapita, indeks pembangunan manusia, investasi dan Covid-19 terhadap ketimpangan pendapatan 34 Provinsi di Indonesia tahun 2017-2022 secara parsial.
3. Untuk mengetahui pengaruh PDRB per kapita, indeks pembangunan manusia, investasi dan Covid-19 terhadap ketimpangan pendapatan 34 Provinsi di Indonesia tahun 2017-2022 secara simultan.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu**

Hal yang baru dalam penelitian ini adalah terdapat variabel Covid-19 sebagai variabel *dummy* yang digunakan untuk membedakan periode pengamatan sebelum dan saat terjadinya krisis ekonomi di tahun 2017-2022.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran umum bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

###### **1. Bagi Pemerintah**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran informasi yang berguna mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan untuk dapat dipahami lebih jauh dalam menetapkan suatu strategi atau solusi mengatasi permasalahan yang ada.

###### **2. Bagi Penulis**

Diharapkan penelitian ini berguna bagi penulis sebagai bentuk wujud dalam penerapan ilmu-ilmu yang telah diperoleh dan juga dapat menambah ilmu

pengetahuan dan wawasan baik secara teoritis maupun empiris, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia.

### 3. Bagi Pembaca atau Pihak Lain

Diharapkan penelitian ini memberikan tambahan ilmu pengetahuan atau bahkan ide dalam menambah studi empiris sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu referensi atau pembanding bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Tasikmalaya dengan pengambilan data melalui *website* Badan Pusat Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik Provinsi, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, serta *website* resmi dan jurnal-jurnal yang menyajikan data *valid*.

### **1.5.2 Jadwal Penelitian**

Penelitian ini telah dilaksanakan selama kurun waktu 9 bulan dari mulai bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 dengan tabel jadwal penelitian sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2022-2023																							
		Okt				Nov-Des				Jan				Feb				Mar-Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyerahan SK dan Pengajuan Judul	■	■	■	■																				
2	Pengesahan Judul				■																				
3	Pengumpulan Data					■	■	■	■																
4	Penyusunan Proposal Skripsi dan Bimbingan									■	■	■	■												
5	Seminar Usulan Penelitian													■											
6	Pengolahan Data														■	■	■	■	■	■	■				
7	Penyusunan Skripsi dan bimbingan																		■	■	■	■	■	■	■
8	Ujian Skripsi																					■			
9	Revisi Skripsi dan Pengesahan Skripsi																						■	■	■